



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 30 Agustus 2021

Halaman: 2

DPD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA Telp. (0274) 540650

HADAPI ATURAN BARU USAI PPKM
Pemulihan Sektor Pariwisata Butuh Dukungan

YOGYA (KR) - Selama kebijakan PPKM sejak 3 Juli 2021, industri pariwisata di Kota Yogya menjadi salah satu yang terdampak. Upaya pemulihan untuk dapat kembali bangkit pun membutuhkan dukungan berbagai pihak. Terutama dari pemerintah yang memiliki sumber daya memadai.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta Dra Sri Retnowati, mengungkapkan roda ekonomi di Kota Yogya mayoritas ditopang oleh industri pariwisata. "Ketika sektor ini tersendat maka ekonominya ikut berpengaruh. Tidak hanya usaha yang diluti warga melainkan pendapatan pemerintah juga berkurang," jelasnya.

Oleh karena itu destinasi wisata baru bisa kembali dibuka ketika kebijakan PPKM semakin dilonggarkan. Akan tetapi pasca PPKM pun harus menghadapi aturan baru. Terutama berbagai pembatasan mulai dari jumlah pengunjung maupun durasi kunjungan. Hal itu otomatis berimbas pada target pendapatan yang harus disesuaikan.

Begitu pula kebijakan One Gate System bagi armada bus pariwisata yang harus melalui Terminal Giwangan. Melalui satu pintu tersebut bus pariwisata

Dra Sri Retnowati
Fraksi Golkar



KR-Istimewa

ta yang membawa rombongan tanpa dilengkapi identitas kesehatan serta kartu vaksin, tidak diperkenankan masuk Kota Yogya.

"Kebijakan itu memang untuk menjamin keamanan semua pihak. Namun di sisi lain berpotensi pada menurunnya jumlah kunjungan. Seperti halnya waktu kunjungan di Malioboro yang dibatasi dua jam," imbuhnya.

Di lain pihak, industri pariwisata yang sudah terpukul cukup berat juga berharap ada perputaran ekonomi yang signifikan usai PPKM. Terutama untuk menutup biaya operasional maupun menjaga kelangsungan usaha dan karyawan. Dukungan dari pemerintah pun sangat dibutuhkan agar keberlangsungan usaha dapat terjaga.

Bentuk dukungan, imbuh Retnowati, dapat berupa bantuan operasional, insentif pajak maupun dispensasi hingga program promosi wisata berkelanjutan. "Pemerintah juga perlu dialog dengan para pelaku wisata. Kendala apa yang dihadapi, harapannya bagaimana kemudian kebutuhannya seperti apa. Dari situ diputuskan solusi yang terbaik," tandasnya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005